FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik

https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik
P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751
Month Year, Vol… No. …

PANCASILA DALAM PERJALANAN SEJARAH POLITIK INDONESIA: ANALISIS IMPLEMENTASI DARI ERA PRA KEMERDEKAAN HINGGA REFORMASI

Abstract

This article aims to analyze the dynamics of Pancasila's implementation across the trajectory of Indonesian political history, spanning from the pre-independence era, the Old Order, the NewOrder, up to the Reform Era. This study is motivated by the fact that Pancasila, as the state foundation and national ideology, has not always been applied consistently in accordance with its core values, but has often been influenced by political interests and power configurations in each historical period. This research employs a descriptive qualitative approach with a literature study method, sourced from books, scholarly journals, and relevant official state documents concerning Pancasila and Indonesian political history. The findings indicate that Pancasila underwent changes in meaning and application patterns in every era. In the pre-independence period, Pancasila existed as cultural values inherent in society. During the Old Order and New Order, Pancasila tended to experience formalization and ideologization, leading to deviations from the values of democracy and social justice. Meanwhile, the Reform Era brought about efforts for the reorientation of Pancasila within the framework of democracy and the supremacy of law, although implementation still faces various challenges. This article affirms that the relevance of Pancasila remains strong as a guide for national and state life, but its practice requires ongoing moral and political commitment.

Keywords: Pancasila; Implementation Dynamics; Political History; Old Order; New Order; Reform Era.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika implementasi Pancasila dalam lintasan sejarah politik Indonesia, mulai dari era pra kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi. Kajian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa tidak selalu diterapkan secara konsisten sesuai dengan nilai-nilai dasarnya, melainkan seringkali dipengaruhi oleh kepentingan dan konfigurasi kekuasaan politik pada setiap periode sejarah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan, yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi negara yang relevan dengan tema Pancasila dan sejarah politik Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pancasila mengalami perubahan makna dan pola penerapan di setiap era. Pada masa pra kemerdekaan, Pancasila hadir sebagai nilai kultural yang hidup dalam masyarakat. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, Pancasila cenderung mengalami formalisasi dan ideologisasi yang berujung pada penyimpangan nilai demokrasi dan keadilan sosial. Sementara itu, era Reformasi membawa upaya reorientasi Pancasila Dalam kerangka demokrasi dan supremasi hukum, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Artikel ini menegaskan bahwa relevansi Pancasila tetap kuat sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, namun pengamalannya membutuhkan komitmen moral dan politik yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Pancasila; Dinamika Implementasi; Sejarah Politik; Orde Lama; Orde Baru; Reformasi.

1. LATAR BELAKANG

1.1 Pendahuluan

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia yang dirumuskan melalui proses sejarah panjang dan sarat dengan dinamika sosial, politik, serta budaya. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tidak lahir secara instan, melainkan berakar kuat dalam kehidupan masyarakat Nusantara sejak masa pra kemerdekaan. Oleh karena itu, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif negara, tetapi juga sebagai refleksi jati diri bangsa yang terus mengalami penafsiran dan penyesuaian sesuai dengan konteks zaman (Kaelan, 2013).

Dalam perjalanan sejarah Indonesia, penerapan Pancasila menunjukkan corak yang berbeda pada setiap periode kekuasaan. Pada masa pra kemerdekaan, nilai-nilai Pancasila tercermin dalam tradisi gotong royong, musyawarah, serta semangat persatuan dalam menghadapi penjajahan. Memasuki era kemerdekaan dan Orde Lama, Pancasila mulai diformalkan sebagai dasar negara, namun implementasinya menghadapi berbagai tantangan politik, seperti perbedaan ideologi, instabilitas pemerintahan, serta penerapan Demokrasi Terpimpin yang memunculkan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip kerakyatan dan keadilan (Notonagoro, 1983).

Perubahan yang lebih signifikan terlihat pada masa Orde Baru, ketika Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal dan instrumen legitimasi kekuasaan negara. Meskipun secara formal Pancasila diklaim dilaksanakan secara murni dan konsekuen, praktik penyelenggaraan negara justru memperlihatkan kecenderungan otoritarianisme, pembatasan kebebasan berpendapat, serta maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang bertentangan dengan nilai keadilan sosial (Dardiri, 2006). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas Pancasila dan realitas penerapannya dalam kehidupan bernegara.

Era Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 membawa harapan baru terhadap pengamalan Pancasila dalam kerangka demokrasi, keterbukaan, dan penegakan hak asasi manusia. Amandemen UUD 1945, kebebasan pers, serta partisipasi masyarakat yang lebih luas menjadi ciri utama periode ini. Namun demikian, tantangan baru juga muncul, seperti liberalisasi yang berlebihan, konflik sosial, lemahnya penegakan hukum, serta masih tingginya praktik korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa Reformasi belum sepenuhnya mampu menghadirkan pengamalan Pancasila yang substantif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Magnis-Suseno, 2011).

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai Pancasila dalam lintasan sejarah politik Indonesia menjadi penting untuk dilakukan secara komprehensif dan kritis. Analisis implementasi Pancasila dari era pra kemerdekaan hingga Reformasi diperlukan untuk memahami bagaimana Pancasila dipraktekkan, ditafsirkan, dan bahkan disimpangkan oleh kekuasaan negara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran utuh mengenai dinamika penerapan Pancasila sekaligus menegaskan relevansinya sebagai ideologi bangsa ditengah perubahan sosial dan politik Indonesia yang terus berlangsung.

1.2 Tinjauan Pustaka

2.1 Pancasila sebagai Nilai Kultural dan Sosio-Historis

Pancasila tidak sekadar lahir sebagai sebuah rumusan politik yang statis, melainkan merupakan kristalisasi daripada nilai-nilai luhur yang telah lama berakar dalam tradisi masyarakat Nusantara. Jauh sebelum fase kemerdekaan formal, prinsip-prinsip seperti gotong-royong, musyawarah untuk mufakat, serta keharmonian beragama telah menjadi identiti budaya yang hidup di tengah masyarakat. Menurut Kaelan (2013), Pancasila berfungsi sebagai refleksi jati diri bangsa yang dinamik, di mana maknanya sentiasa disesuaikan mengikut konteks zaman tanpa meninggalkan akar tradisinya.

2.2 Evolusi Ideologi dalam Konteks Orde Lama dan Orde Baru

Dalam perjalanan politik Indonesia, tafsiran terhadap Pancasila sering kali mengalami anjakan mengikut konfigurasi kuasa pada zamannya. Pada era Orde Lama, peralihan menuju sistem Demokrasi Terpimpin menyebabkan Pancasila ditafsirkan secara sentralistik demi kepentingan kestabilan politik, yang kemudiannya mencetuskan ketegangan ideologi melalui konsep Nasako. Seterusnya, pada era Orde Baru, berlaku proses formalisasi yang sangat ketat di mana Pancasila dijadikan sebagai "asas tunggal" bagi semua organisasi. Walaupun secara retorik kerajaan menekankan pengamalan Pancasila secara murni, namun dalam prakteknya, ideologi ini sering digunakan sebagai instrumen legitimasi kekuasaan untuk mengekalkan otoritarianisme dan menyekat kebebasan bersuara.

2.3 Reorientasi dan Cabaran PancasiladiEra Reformasi

Kejatuhan rezim Orde Baru pada tahun 1998 membuka lembaran baru bagi reorientasi Pancasila dalam kerangka demokrasi dan kedaulatan undang-undang. Pada fase ini, Pancasila tidak lagi diposisikan sebagai alat indoktrinasi negara, melainkan sebagai nilai dasar (value system) yang menjiwai amandemen perlembagaan dan penguatan institusi demokrasi.

Walau bagaimanapun, kebebasan yang dibawa oleh arus Reformasi turut menghadirkan cabaran baru yang kompleks. Liberalisasi yang melampau, konflik horizontal, serta ancaman radikalisme menjadi ujian bagi ketahanan nilai-nilai Pancasila dalam menjaga perpaduan nasional. Oleh itu, relevansi Pancasila di era modern amat bergantung kepada komitmen moral dan politik para pemimpin serta rakyat untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut secara substantif dalam kehidupan seharian, bukan sekadar simbol normatif.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan menganalisis secara mendalam dinamika implementasi Pancasila dalam lintasan sejarah politik Indonesia, mulai dari era pra kemerdekaan hingga era Reformasi. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena, peristiwa, dan kebijakan politik yang berkaitan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila pada setiap periode sejarah tanpa melakukan manipulasi terhadap objek penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran literatur yang relevan. Data tersebut meliputi buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional yang terbit dalam lima tahun terakhir, serta dokumen resmi negara seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, dan laporan resmi lembaga negara yang berkaitan dengan Pancasila dan sejarah politik Indonesia. Sumber-sumber klasik tetap digunakan sebagai landasan teoritis dengan tetap didukung oleh referensi mutakhir agar analisis tetap relevan secara akademik

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif, yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan implementasi nilai-nilai Pancasila pada setiap era politik untuk mengidentifikasi pola penerapan, penyimpangan, serta upaya reorientasi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan metode penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan sistematis mengenai dinamika penerapan Pancasila dalam sejarah politik Indonesia serta menegaskan relevansinya sebagai ideologi bangsa hingga masa kini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian pustaka terhadap berbagai sumber literatur ilmiah dan dokumen resmi negara, dapat dipahami bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia mengalami dinamika implementasi yang kompleks dan beragam sepanjang perjalanan sejarah politik Indonesia. Perbedaan konteks sosial, politik, dan kekuasaan pada setiap periode berpengaruh signifikan terhadap cara Pancasila ditafsirkan dan diterapkan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada masa pra kemerdekaan, nilai-nilai Pancasila belum dirumuskan secara formal, namun telah hidup dan berkembang dalam praktik sosial masyarakat Nusantara. Nilai ketuhanan tercermin dalam kehidupan religius masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi antarumat beragama, sementara nilai kemanusiaan dan persatuan tampak dalam semangat gotong royong, solidaritas sosial, serta perlawanan kolektif terhadap penjajahan. Musyawarah sebagai cara pengambilan keputusan dan keadilan sosial sebagai tujuan bersama juga telah menjadi bagian dari sistem nilai masyarakat tradisional.

Temuan ini menunjukkan bahwa Pancasila pada fase pra kemerdekaan berfungsi sebagai nilai kultural dan sosio-historis yang tumbuh secara organik dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, Pancasila bukanlah produk ideologi yang lahir secara tiba-tiba, melainkan hasil kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa yang kemudian diformalkan dalam proses perumusan dasar negara menjelang kemerdekaan Indonesia.

Memasuki masa Orde Lama, Pancasila mulai difungsikan secara formal sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Namun, dinamika politik yang ditandai dengan instabilitas pemerintahan, konflik ideologi, serta pergeseran sistem demokrasi menuju Demokrasi Terpimpin memengaruhi penerapan nilai-nilai Pancasila. Dalam praktiknya, penafsiran Pancasila cenderung bersifat sentralistik dan dipengaruhi oleh kepentingan politik penguasa.

Konsep Demokrasi Terpimpin yang dijalankan pada periode ini menunjukkan adanya penyimpangan terhadap prinsip kerakyatan dan musyawarah sebagaimana diamanatkan dalam sila keempat Pancasila. Kekuasaan yang terpusat pada satu figur pemimpin mengakibatkan berkurangnya ruang partisipasi politik masyarakat serta melemahnya mekanisme kontrol terhadap kekuasaan. Kondisi ini menegaskan bahwa meskipun Pancasila dijadikan sebagai dasar normatif negara, implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial.

Pada masa Orde Baru, Pancasila mengalami proses formalisasi dan ideologisasi yang lebih kuat. Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi seluruh organisasi politik dan kemasyarakatan, serta dilembagakan melalui berbagai kebijakan negara. Secara formal, rezim Orde Baru mengklaim telah melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen demi menjaga stabilitas nasional dan mendukung pembangunan.

Namun, hasil kajian menunjukkan adanya kontradiksi antara klaim tersebut dengan realitas praktik penyelenggaraan negara. Pancasila sering digunakan sebagai instrumen legitimasi kekuasaan untuk membenarkan kebijakan politik yang bersifat otoriter, membatasi kebebasan berpendapat, serta menekan oposisi. Selain itu, maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Pancasila dalam perjalanan sejarah politik Indonesia menunjukkan dinamika yang sangat dipengaruhi oleh konteks kekuasaan dan konfigurasi politik pada setiap era. Sejak masa pra kemerdekaan, nilai-nilai Pancasila telah hidup dan berkembang sebagai nilai kultural yang mengakar dalam kehidupan masyarakat Nusantara, kemudian dirumuskan secara formal sebagai dasar negara setelah Indonesia merdeka.

Dengan demikian, Pancasila tetap relevan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah perubahan sosial dan politik yang terus berlangsung. Namun, keberlanjutan dan efektivitas implementasi Pancasila sangat bergantung pada komitmen moral dan politik seluruh elemen bangsa untuk mengamalkannya secara konsisten dan substantif, tidak hanya sebagai norma konstitusional, tetapi juga sebagai nilai hidup dalam praktik kehidupan politik, hukum, dan sosial masyarakat Indonesia.

.

6. DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Sigma Pancasila. BPIP (Buku Tentang Nilai-nilai dasar Pancasila). 2020. BPIP

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Pokok-Pokok Ekonomi Pancasila. BPIP, 2022. BPIP

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Pancasila Dari Indonesia untuk Dunia. BPIP, 2023. BPIP

Pendidikan Pancasila (buku teks Kurikulum Merdeka). Kemendikbud Ristek & BPIP,

2023. Buku Kemdikbud

Dachlan, Rita Farida, et al. Pendidikan Pancasila. CV HEI Publishing Indonesia, 2024. ISBN: 978-623-89139-1-6. Researchgate

EBOOK Pancasila di Tengah Arus. (diskusi Pancasila di era digital), 2025. UMSURA repository

Pancasila (koleksi tulisan akademik dari berbagai penulis). Institut Teknologi PLN (unduh PDF), terbitan terbaru. IT PLN Repository